

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari lima pulau besar dan ratusan bahkan ribuan pulau kecil yang kesemuanya memiliki karakteristik dan khas yang berbeda beda. Dari 34 provinsi yang ada, masing masing memiliki potensi dan keistimewaan yang berbeda beda, baik berupa pariwisata sumberdaya alam ataupun sumber daya manusianya. Namun ada beberapa daerah atau provinsi yang mendapatkan keistimewaan secara konstitusional, yang memiliki kekuatan hukum dan diatur dalam Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Yaitu dalam hal Perekonomian, Pemerintahan, dan Hukum. Dari beberapa daerah yang mendapatkan keistimewaan tersebut salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping ada daerah lain seperti Provinsi Papua, dan Nangru Aceh Darusalam.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi yang memiliki keistimewaan dari beberapa Provinsi yang ada di Indonesia. Keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah keistimewaan yang didapat secara instan melainkan keistimewaan yang diperoleh melalui proses yang panjang. Keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan dalam hal kepemimpinan Pemerintahan. Kembali pada sejarah, ketika kembalinya Belanda ketengah

air, yang lebih dikenal dengan agresi belanda kedua, yang ingin merebut kembali wilayah negara kesatuan repoblik Indonesia yang pada saat itu sudah resmi menjadi negara dan sudah mendapat pengakuan secara Internasional.

Ketika seluruh wilayah NKRI sudah dikuasai oleh Belanda, hanya Yogyakarta yang masih menjadi satu satunya wilayah yang masih bertahankan Kedaulatannya. Pusat Pemerintahan sempat dipindahkan ke Yogyakarta, segala aktifitas Pemerintahan dilaksanakan di Yogyakarta. Hingga lahir lah perjanjian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta, yang lebih dikenal dengan Perjanjian Linggar Jati. Dimana salah satu isinya bahwa pihak Belanda mengakui kedaulatan wilayah Keraton Yogyakarta. Karena begitu besar rasa cintanya terhadap tanah air Indonesia pihak keraton mengaku menggabungkan diri dengan NKRI. Maka pada saat itu Indonesia kembali ada dalam peta Dunia. Dan kemudian pada Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas.

Namun akhir akhir ini, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diusik, dan berdasarkan pemberitaan media akan dihapuskan, karena dianggap tidak sesuai dengan sistem Pemerintahan yang berlaku pada saat

Pemerintahanya. Jadi setiap kepala negara atau kepala daerah harus dipilih melalui Pemilihan umum. Karena dalam sistem demokrasi rakyat merupakan kedudukan tertinggi, yang lebih dikenal dengan Pemerintahan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Pada dasarnya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup demokrasi, karena Dewan Perwakilan Rakyatnya dipilih secara demokrasi, begitu pula dengan kepala daerah tingkat Kabupaten dan Walikota juga dipilih melalui pemilihan umum. Hanya Gubernur yang ditetapkan tentu hal ini sudah sesuai dengan falsafah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama. Dan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh pengamat politik lokal Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat atau setuju dengan penetapan dari pada pemilihan.

Apabila masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat dengan penetapan, untuk apa lagi diperdebatkan. Menurut saya daripada mengeluarkan dana besar untuk Pemilu, yang hasilnya sudah dapat diketahui siapa pemenangnya. Lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan daerah lainya. Pada prinsipnya disinilah peran DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) DIY untuk meperlihatkan kinerjanya. Karena masalah

Yogyakarta. Begitu juga dengan Partai Politik, ini merupakan ke-  
bagi Partai Politik baik ditingkat daerah maupun pusat untuk  
masa. Jadi Partai Politik tidak hanya muncul ketika akan pe-  
Sesungguhnya Partai Politik dapat menjalankan fungsinya k  
masalah (konflik) yang muncul di masyarakat.

Konflik bisa diolah menjadi dukungan basis masa ta  
berkampanye. Dengan melihat konflik RUUK DIY antara I  
Pusat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Politik dapat  
peran sebagai penengah dalam penyelesaian masalah. Partai P  
menjalankan fungsi Agregasi, Artikulasi dan penyelesaia  
masyarakat DIY terkait dengan masalah ini. Yang kemu  
disampaikan melalui wakilnya yang ada di DPR pada saat  
pembahasan RUUK DIY

Dalam Negara Demokratis, Partai Politik menye-  
beberapa fungsi; salah satu fungsi ialah sebagai sarana komun-  
Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah., artinya  
atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai da  
adalah sebagai jembatan antara "mereka yang memerintah"  
yang diperintah".<sup>1</sup>

Bagaimana proses peran dan fungsi parpol apakah si  
apa efektif atau belum. Apakah fungsi sosialisasi, fungs

fungsi artikulasi, maupun fungsi agregasi dari partai politik sudah berjalan dengan baik atau belum. Mengingat begitu pentingnya fungsi partai politik yang merupakan salah satu perwujudan demokrasi adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik sehingga apa yang dikehendaki dapat terwujud yang disampaikan oleh wakil wakilnya dilembaga pemerintahan.

Partai Politik sebenarnya hanya sarana penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah namun Partai Politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan melalui mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pihak yang berwenang dengan cara "lobby". Dari sana dapat kita lihat bagaimana usaha dari partai Golkar dalam menyambung lidah rakyat sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah akan dapat terlihat sehingga masyarakat lebih jelas dan mengerti tentang kinerja dari pada Partai Golkar tentang memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta,

DPD Partai Golkar Kulonprogo memegang teguh semangat mendukung keistimewaan DIY. Agar hasil pembahasan RUUK DIY sesuai dengan keinginan masyarakat maka jajaran pengurus Partai Golkar mengajak seluruh politisi khususnya yang berada di lembaga legislatif baik di DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI berjuang keras mendesak pemerintah pusat untuk memutuskan penetapan Gubernur DIY dan bukan

Sebagai bentuk dukungan terhadap penetapan Gubernur DIY tandas mantan Kepala Desa Panjatan ini, pengurus DPD Partai Golkar Kulonprogo selalu terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang menyuarakan Keistimewaan DIY. "Setiap event mendukung Keistimewaan DIY mulai dari sidang paripurna keistimewaan, jalan sehat mubeng beteng golong giling

Selain terlibat langsung dalam setiap kegiatan pengerahan massa, Sukarman juga memastikan, pada momentum Pemilukada Kulonprogo pihaknya telah mengikat pasangan calon (paslon) yang diusung bersama Partai Golkar, Gerindra PDK, PKPB dan PKNU yakni Drs Suprpta-Drs Moch So'im (Prpto karo Soim) 'Prakoso' untuk kontrak politik mendukung Keistimewaan DIY, penetapan, Partai Golkar selalu di barisan terdepan katanya lagi.<sup>2</sup>

Dengan melihat apa yang dijelaskan dari kutipan diatas maka saya ingin mengetahui lebih lagi tentang apa peranan Partai Golkar dalam memperjuangkan undang undang Keistimewaan DIY, dan apa apa saja yang di lakukan partai golkar dalam menyakinkan masyarakat Yogyakarta tentang keistimewaan DIY, hal ini juga senada dengan apa yang di katakan Partai Golkar tentang dukungan terhadap UUK daerah istimewa Yogyakarta berikut ini

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santosa, menegaskan parpolnya sepenuhnya mendukung RUUK DI Yogyakarta. Dukungan itu

sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta, yaitu penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung menjadi gubernur dan wakil gubernur.<sup>3</sup>

Dengan berbagai hal yang di tuturkan diatas maka saya ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang Peran partai Golkar terhadap Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta dimana Partai yang berlambang beringin ini selalu berslogan Sultanku Gubernurku.

Fungsi Partai Politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan. Apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan<sup>4</sup>

Gandung Pardiman menerima songsong kamukten dari ngarso dalem Sri Sultan HB X pada saat peluncuran Gerakan Pro penetapan (GPP) untuk mempertahankan Keistimewaan Yogyakarta, 29 juni 2008 yang lalu , yang merupakan simbol amanah yang diberikan Rakyat Yogyakarta kepada Gandung Pardiman selaku pejuang keistimewaan Yogyakarta agar selalu dapat mengayomi masyarakat<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id>

<sup>4</sup> Drs. Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 41*

<sup>5</sup> *Kedaulatan Rakyat* 30 nov 2009

Dengan hal ini tentu akan memperkuat mengapa harus Partai Golkar yang menjadi bahasan saya karena partai Golkar Merupakan Partai yang memiliki kedekatan yang khusus dengan partai Golkar.

Dengan melihat fenomena kondisi masyarakat seperti yang dipaparkan penulis diatas, peneliti hanya meneliti peran satu partai saja yaitu Partai Golkar. maka penulis ingin melihat seberapa kuatkah mesin politik Partai Golkar, sebagai partai yang berhaluan Nasionalis dengan segala instrumen yang ada di dalamnya, menjawab gemelut politik yang terjadi di daerah ini, sehingga mampu membawa aspirasi masyarakat , dan serta merta menjadi partai yang mengakar di dalam masyarakat, kemudian melihat bagaimana pengaruh tokoh Partai Golkar dalam mempengaruhi masyarakat dalam menjadikan Rancangan Undang undang menjadi Undang undang keistimewaan Yogyakarta, tentu dengan melihat kearifan tokoh Partai dalam menilankan amanat yang diberikan masyarakat

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah yang dapat dijadikan permasalahan adalah :

**Bagaimana Peran Partai Golkar Dalam Memperjuangkan Undang-Undang Keistimewaan DIY (Tahun 2010 -2012)?**

## **C . Tujuan dan manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Untuk mendeskripsikan Peran DPW Partai Golkar Yogyakarta terhadap keistimewaan Yogyakarta. dan untuk mengetahui sejauh perjuangan yang sudah dilakukan.

### 2. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi politisi dan masyarakat umum tentang keistimewaan DIY
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Partai Politik, politisi maupun masyarakat umum sebagai sumber referensi dalam menerapkan mengetahui
3. Sebagai bahan perbandingan dan sumbangan informasi bagi

#### D. Kerangka Dasar Teori

Teory adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala gejala yang di teliti di satu atau beberapa factor tertentu dalam suatu masyarakat.

##### 1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik merupakan wadah penyalur arpirasi masyarakat kepada Pemerintah sehingga kepentingan masyarakat dapat tersalurkan melalui partai politik

Berikut adalah beberapa pengertian partai politik menurut beberapa pakar politik.

Menurut Carl J Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil maupun materil.

Menurut RH. Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedkit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sedangkan menurut Sigmun Neuman partai politik adalah organisasi dari aktifis aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar

mempunyai pandangan yang berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita sama. Adapun biasanya tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan.<sup>6</sup>

Menurut Hendra Nurtjahjo, perwakilan menginsyafi adanya tiga karakter yang dapat secara penuh mewujudkan rakyat yaitu :

- a. Perwakilan politik ( political representation)
- b. Perwakilan daerah ( regional representation)
- c. Perwakilan golongan ( functional representation)

Dalam hal ini Indonesia sudah memilikinya yaitu yang diwakilkan oleh DPR, DPD, dimana keduanya dapat membawa aspirasi masyarakat kewilayah pemerintahan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat akan terwujud.

---

<sup>6</sup> Meriam budiardjo. dasar dasar ilmu politik, PT Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, halaman 160-161

## 2. Partisipasi Partai Politik

Peran menurut Jack C. Plano, Robert E., dan Helena S. Robin adalah sebagai berikut.

“seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social”<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas maka peran berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya, dalam pengambilan suatu keputusan pada masyarakat secara sah.

Peranan menurut Astrid S. Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu

1. Peran adalah mengikuti norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga diartikan perilaku individu yang penting dalam struktur social<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jack C. Plano, Robert E., dan Helena S. Robin terjemahan oleh Edis. Siregar, kamus analisis politik, rajawali pers Jakarta, cetakan kedua, 1998 hal 220

<sup>8</sup> Astrid S. Susanto, pengantar sosiologi dan perubahan social bina cita Jakarta, 1983, hal 95

Dari ketiga hal tersebut maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu / atau kelompok memiliki yang dominan atas individu / kelompok lainnya, itu dimana mempunyai kedudukan kekuasaan. sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber lain. Selain kekayaan dan kehormatan ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh secara periodik.

Status yang dimiliki seseorang tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena bentuk sosial yang bersifat timbal balik. Semakin besar peranan seseorang terhadap lingkungan masyarakat maka akan semakin besar pula status kedudukan orang tersebut.

Menurut Soejono Soekanto peran adalah merupakan aspek dinamis dari pada kedudukan atau status, jadi apabila seseorang telah melakukan hak hak dan lewajibannya maka ia mengutamakan perannya.<sup>9</sup>

Disini sudah cukup jelas bagaimana perjuangan kraton dulu bagaimana ketika bergabungnya Yogyakarta ke NKRI sehingga berdampak pada daerah daerah lainya bergabung yang tak lepas dari pada karena bergabungnya Ygyakarta.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto "Sosiologi Suatu Pengantar" CV Pajeneh 1982 hal 22

Di masyarakat ada beberapa golongan yang dianggap sangat berpengaruh pada masyarakat atau yang biasa disebut elit lokal. Menurut Abdul kapphi elit lokal dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu :

Kelompok pertama kelompok bangsawan yang diperoleh kedudukan elit karena faktor daerah atau keturunan. Kelompok kedua yaitu kaum ulama ( tokoh agama ) yang mempunyai posisi karena pengetahuan agamanya tinggi. Ketiga adalah mereka karena jabatan atau kedudukannya, perangkat birokrasi kekuasaan berhasil memperoleh status elit. Elit birokrasi ini yang bukan bangsawan atau ulama, biasanya di temukan sebagai pengemban tugas tugas rutin yang di bebaskan oleh adat tradisi<sup>10</sup>

Dalam penjelasan diatas maka setiap golongan tersebut mempunyai peranan masing pada bidangnya, namun bukan berarti tidak bisa merangkap dan setiap stuktur sosial yang ada pada masyarakat bisa berubah berdasarkan kehendak masyarakat, biasa perubahan karena perubahan atau tuntutan zaman yang sudah tidak padat mengikuti kemajuan, namun ada beberapa hal yang tetap dipertahankan karena dinggap masyarakat memang harus di pertahankan untuk melestarikan budaya dan juga pemerintahan yang dianggap masyarakat lebih baik.

Transisi politik Indonesia yang bergulir sejak pasca reformasi memberikan nuansa baru dalam proses pemberdayaan sumberdaya

manusia lokal dalam hal ini terbukanya gerbang demokrasi secara luas dan makin meningkatkan peran elit lokal dalam pembangunan daerah.<sup>11</sup>

Disini dituntut peran yang sangat besar untuk pembangunan daerah, sehingga setiap kelompok masyarakat harus aktif dalam membangun daerahnya masing masing, sehingga peranan tokoh sangat berpengaruh untuk kemajuan.

### 3. Fungsi partai

Berikut adalah beberapa fungsi partai politik.<sup>12</sup>

#### a. Komunikasi Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah menyalurkan beberapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga ketidak jelasan ide dan pendapat tadi didalam masyarakat berkurang. Pendapat dan ide yang berbeda dimasyarakat diakomodasi oleh elit partai yang kemudian disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan tentu saja berdasar atas kepentingan bersama. Memang pada mulanya sebelum ide dan pendapat teraplikasi kemasyarakat, elit partai terlebih dahulu merumuskan dan menetapkannya kedalam program partai untuk kemudian diteruskan ke pemerintah. Selain itu partai politik juga

---

<sup>11</sup> Ryaas Rasyid 'makna pemerintah tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan' PT jasrif watampone, Jakarta, 1999 halmn 77

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington, dalam partai politik dan agenda transisi demokrasi, hal 84

berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dengan demikian terjadi arus informasi yang up to down atau sebaliknya sehingga peran dari partai politik berupa penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, dengan antara pemerintah dan warga negara. Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini partai politik sering disebut broker atau perantara dalam suatu bursa bursa ide. Bahkan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik adalah sebagai alat pendengar bagi perintah yang bertindak sedang warga negara sebagai pengeras suara.

#### b. Sosialisasi Politik

Peran lain dari partai politik adalah sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization). Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dimasyarakat dimanapun berada.

Biasanya sosialisasi ini berjalan secara berangsur- angsur dari masa kanak-kanak sampai mencapai dewasa sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-

Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik dalam rangka memenangkan Pemilu langsung, partai harus berusaha optimal untuk memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan ini maka partai berupaya menciptakan image yang baik dimata masyarakat bahwasanya elit-elit politik dalam partai-partai yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan umum.

Selain berupaya menanamkan solidaritas didalam tubuh partai, partai politik juga pendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Adapun proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan penataran.

#### c. Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi mencari atau mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian maka partai akan dapat memperluas partisipasi politik masyarakat. Caranya dapat melalui kontak pribadi dan persuasi. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader dimasa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi

Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai politik telah dapat memenuhi kebutuhannya, dengan adanya keterlibatan dari individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan lokal. Dan proses pengkaderan merupakan proses generasi dalam tubuh partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan dengan lancar.

#### d. Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng in-putan sebagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan pada suatu lembaga. Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Disini kelompok kepentingan tersebut adalah partai Golkar dimana partai Golkar sebagai

Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat. Artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam system politik di suatu Negara.

Artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Terlebih pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar, mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif, legislative, dan dalam mekanismenya sendiri, yaitu melalui lobby-lobby politik. Dalam hal keputusan, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang menolong masyarakat dan juga terkadang menyulitkan masyarakat. Ini semua tidak terlepas dari artikulasi kepentingan segmen masyarakat

#### e. Agregasi Kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif alternatif pembuatan kebijakan publik. Indonesia adalah bangsa yang heterogen, terdapat banyak suku, ras , dan agama, sehingga perlu penjaringan aspirasi yang dapat melindungi dan menguntungkan masyarakat di semua pihak. Ketidak mampuan dalam memilih kebijakan yang tepat dapat berakibat pada ketidakpuasan kelompok masyarakat. Yang berdampak pada kepentingan politik.

Dalam masyarakat-masyarakat demokratis, partai sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan program politik dan menyampaikan usulan pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan oleh partai untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan, untuk mengetahui apakah kelompok kepentingan itu mendukung calon tersebut.

Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang Undang

Agregasi kepentingan juga merupakan salah satu fungsi input. Yang dimaksud agregasi kepentingan adalah fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum

#### f. Pengendalian Konflik

Partai Politik merupakan lembaga yang mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Walau kita mengetahui sebuah kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua pihak namun sebaik baiknya kebijakan adalah kebijakan yang dapat mewakili yang mayoritas tanpa mengabaikan yang minoritas, tidak pula kita merendahkan pendapat yang minoritas karena itu dapat memicu konflik, maka dari itu diharapkan keputusan apapun itu nantinya dapat membawa kebaikan untuk masyarakat Yogyakarta.

#### g. Kontrol Politik

Merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur

suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk meluruskan kebijakan atau pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.

Fungsi lain dari partai politik adalah dalam upaya agar dapat menguasai negara adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengadakan pendidikan politik yang terarah kepada sasarnya. Tanpa pendidikan politik yang efektif maka partai politik itu tidak akan mempunyai kader.
2. Memasyarakatkan ajaran politik secara efektif sehingga rakyat merasakan kegunaannya.
3. Memilih pemimpin politik secara demokratis, sehingga pemimpin yang dipilih betul-betul tangguh dan bertanggung jawab atas kehidupan partai politik yang diharapkan.
4. Memadukan pikiran politik yang berbeda, baik antara pemimpin dengan pemimpin maupun antar pemimpin dengan bawahannya. Pemikiran pemimpin politik yang berbeda bahkan bertentangan satu dengan yang lain akan menimbulkan terjadinya perpisahan, akibatnya partai politik itu sendiri yang pada akhirnya akan pecah.

---

<sup>13</sup>Erman Hermawan, politik membela yang benar, Yayasan pengkajian dan layanan informasi untuk kedaulatan rakyat, Yogyakarta, 2001, hal 71-72

5. Memperjuangkan kepentingan rakyat baik kepentingan Politik, Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Partai Politik yang tidak dapat menjalankan fungsinya ini akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh pengikutnya sehingga semakin lama gerak partai akan semakin kecil. Akhirnya enggan untuk tetap hidup ataupun mati, mengingat bahwa kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya sebenarnya merupakan hak-hak asasi manusia.
6. Mengkritik atau mengawasi rezim yang memerintah. Partai yang tidak berani mengkritik jalannya pemerintahan diindikasikan ada dua kemungkinan yaitu partai yang mendapat subsidi dari Pemerintah atau Pemimpin Partainya yang tidak mempunyai program, sehingga selalu ikut program partai partai atau golongan yang sedang memerintah agar partai politik dapat melakukan pengawasan atau kritik yang efektif maka diperlukan beberapa syarat:<sup>14</sup>
  - a. Pemimpin Partainya tidak dipilih oleh Pemerintah
  - b. Pemimpin Partai tidak ikut duduk dalam Pemerintahan (badan eksekutif) jika kalah dalam pemilu.
  - c. Partai Politik bukan hanya merupakan partai masa akan tetapi

- d. Partai Politik harus mempunyai disiplin yang kuat baik disiplin terhadap prinsip maupun terhadap program.
- e. Partai politik mempunyai program dan ideologi yang jelas
- f. Partai Politik mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan rakyat, kepribadian bangsa, dan tujuan negara, bukan terhadap kepentingan program atau kelompok kecil yang mengelilingi pemimpin politik.

### **E. Defenisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pembatasan antara satu konsep dengan konsep lain terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan.

1. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dalam suatu masyarakat, yang merupakan kemampuan untuk bertindak dan berusaha sesuai dengan norma yang mengikat.
2. Partai adalah wadah bagi masyarakat dalam meyalurkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perpolitikan di dunia demokrasi Indonesia, Dalam hal ini adalah Partai Politik Golkar DIY.
3. Keistimewaan adalah daerah yang memiliki peraturan secara khusus mengenai suatu peraturan Daerahnya yang sudah

## **F. Defenisi Operasional**

Pengertian definisi operasional menurut Koentjaraningrat adalah usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain<sup>15</sup>

Defenisi Operasional adalah bagaimana cara menggunakan atau melihat suatu variable sehingga penelitian ini benar benar terarah dengan baik dan jelas. Defenisi operasional yang di lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Peran Partai Golkar sebagai Partai Politik terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Kontribusi Partai Golkar terhadap UUK DIY
  - b. Keterlibatan Partai Golkar dalam memperjuangkan UUK DIY
2. Fungsi Partai Golkar sebagai Partai Politik terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Fungsi Artikulasi Kepentingan
  - b. Fungsi Agregasi Kepentingan
  - c. Fungsi Sosialisasi Kepentingan
  - d. Fungsi Partai Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemerintahan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bungka angka angka. Hal ini di sebabkan oleh karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam penelitian ini menganalisis penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara menyeluruh dengan mengemukakan ha-hal yang melatar belakangi pemikiran

### **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder

#### **1. Data Primer**

Data primer data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh organisasi atau perorangan.<sup>16</sup> Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer juga dapat berupa opini subjek secara

<sup>16</sup> Siti Widiyeh O dkk 2001 sosiologi 2 Jakarta :PT bumi aksara h. 78

individual atau kelompok, meliputi indicator-indikator yang akan diuji pengaruhnya, serta hasil observasi terhadap kegiatan atau kejadian

Dalam hal ini saya menggunakan data dari Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta dimana data data yang saya dapat dari pada DPD partai Golkar DIY.

## **2. Data Sekunder**

Merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung artinya melalui media perantara. Data sekunder merupakan data pendukung dari pada data primer yang diambil dari pada dokumentasi mengenai lokasi penelitian baik yang dipublikasi maupun yang tidak di publikasikan<sup>17</sup> data sekunder biasanya didapat dari nara sumber yang terpercaya missal tokoh adat atau tokoh elit yang pernah berinteraksi dengan apa yang sedang diteliti dimasa lalu.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu interview dokumentasi dan juga observasi langsung ke partai Golkar

### **1. Interview/ wawancara**

<sup>17</sup> Nur Indrianto dan Bambang Sunarya metode penelitian. Liris PBF Yogyakarta 2000. Hal

Interview adalah teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel<sup>18</sup>. Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam mengenai apa yang sedang diteliti secara mendalam dan detail, teknik ini digunakan supaya peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai keadaan internal dan juga eksternal Partai Golkar. Dan saya mewawancarai Ketua DPD partai Golkar atau yang mewakili.

## **2. Dokumentasi :**

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisis data data tertulis dalam dokumen dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku media cetak dan yang lainnya<sup>19</sup>. Dalam penelitian ada banyak sumber yang dapat digunakan missal surat kabar, television, internet dan juga yang lainnya.

Dalam hal data dokumentasi maka saya menggunakan data data dari dokumen partai Golkar DIY dan juga data yang saya dapat sdari sumber2 lain misal Internet dan juga surat kabar

## **3. Unit Analisa**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan unit analisisnya adalah partai golkar Yogyakarta dengan melihat perannya dalam

<sup>18</sup> Siti waridah Q, dkk2001.sosiologi2.jakarta:PTbumi aksarah.hlmn91

<sup>19</sup> M. sitomus 2000 berkeselatan dengan sosiologi2 jakarta:selangor h. 99

perjuangan keistimewaan Yogyakarta, tahun 2010-2012 yaitu tokoh partai Golkar, yang meliputi :

1. Ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pusat Informasi partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yakni teknik analisa yang mendasarkan pada data kualitatif atau data berupa wujud dari kata kata penulis yang menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>20</sup> Tehnik kualitatif terdiri dari tiga jalur yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>21</sup>.

Berawal dari usaha mengumpulkan data data yang dibutuhkan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi selanjutnya dilakukan penilaian data, penilaian data berdasarkan validitas data dan reliabilitas, penafsiran setidaknya adalah menyusun data dimaksudkan sebagai usaha memilih dan menggolongkan dalam katagori tertentu. Setelah data tersusun maka dilakukan interpretasi data untuk menjelaskan arti yang terkandung didalam data interpretasi

<sup>20</sup>Lexi.j.meleong,metodelogi penelitian kualitatif, (PT Remaja rosdakarya, bandung: remaja rosdakarya, 1994),hal,3.

<sup>21</sup>Lexi.j.meleong,metodelogi penelitian kualitatif, (PT Remaja rosdakarya, bandung: remaja rosdakarya, 1994),hal,3.

dilakukan untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang hakikatnya didasarkan pada sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya menganalisa gejala gejala atau objek yang diteliti menginterpretasikan data atas teori yang ada serta untuk mencari makna yang bersifat menyeluruh